

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

Jl. Pelabuhan Badas No.1 Sumbawa Besar

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

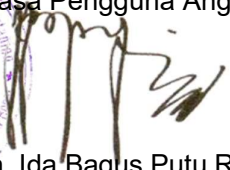
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Sumbawa Besar, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,


drh. Ida Bagus Putu Raka Ariana
NIP. 196612251993031001

Kata	
Pengantar.....	I
Daftar Isi.....	II
Daftar Lampiran.....	IV
Pernyataan Tanggung Jawab.....	V
Ringkasan.....	6
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	8
II. Neraca.....	9
III. Laporan Operasional.....	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	12
A. Penjelasan Umum.....	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	19
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	19
B.2. Belanja.....	20
B.3. Belanja Pegawai.....	21
B.4. Belanja Barang.....	22
B.5. Belanja Modal.....	23
B.5.1. Belanja Modal Tanah.....	23
B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	24
B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	25
C.1. Aset Lancar.....	25
C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid).....	25
C.1.2. Persediaan.....	25
C.2. Aset Tetap.....	25
C.2.1. Tanah.....	25
C.2.2. Peralatan dan Mesin.....	26
C.2.3. Gedung dan Bangunan.....	27
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	28
C.2.5. Aset Tetap Lainnya.....	28
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	28
C.3. Aset Lainnya.....	29
C.3.1. Aset Lain-lain.....	29
C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.....	30
C.4. Kewajiban Jangka Pendek.....	30
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga.....	30
C.5. Ekuitas.....	31
C.5.1. Ekuitas.....	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	32
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	32
D.2. Beban Pegawai.....	32
D.3. Beban Persediaan.....	33
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	33

D.5.	Beban Pemeliharaan.....	34
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	35
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	35
D.8.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	35
D.9.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	36
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	37
E.1.	Ekuitas Awal.....	37
E.2.	Surplus/Defisit-LO.....	37
E.3.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar...	37
E.3.1.	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	37
E.3.2.	Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi.....	37
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	38
E.4.1.	Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL).	38
E.4.2.	Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	38
E.5.	Ekuitas Akhir.....	39
F.	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya.....	40
F.1.	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	40
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	40

1. BAR Internal Antara Operator SAIBA dengan Bendahara Pengeluaran
2. LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2019
3. BKU Halaman Terakhir Bendahara Pengeluaran Desember 2019
4. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019
5. BAR Internal antara Operator SAIBA dengan Bendahara Penerimaan Desember 2019
6. LPJ Bendahara Penerimaan bulan Desember 2019
7. BKU Halaman Terakhir Bendahara Penerimaan Desember 2019
8. BAR Internal antara Bendahara Penerimaan dengan Operator IQFAST Desember 2019
9. Bukti Setor Ke Kas Negara untuk kerugian Negara TA 2018 dan 2019
10. SKTJM
11. Berita Acara Opname Fisik Persediaan per 31 Desember 2019
12. BAR Internal antara Operator SAIBA dengan Operator SIMAK Desember 2019
13. Neraca Aplikasi SIMAK-BMN
14. Daftar Transaksi BMN per 31 Desember 2019 Intrakompatible dan Ekstrakompatible per kelompok barang.
15. Usulan Penghapusan Barang Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah
16. DIPA Revisi dan POK Revisi
17. Hutang Kepada Pihak Ketiga (Belanja Pegawai yang Belum Dibayar)
18. Print Out Aplikasi SIMPEG
19. BAR E-Rekon dengan KPPN bulan Desember 2019
20. Tindak Lanjut LHP Itjentan TA 2019
21. Memo Penyesuaian Tahun 2019.
22. Catatan Hasil Review (CHR) Itjen
23. Berita Acara Kesepakatan
24. Print Out Laporan SAIBA 2019

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sumbawa Besar, 31 Desember 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,



drh. Ida Bagus Putu Raka Ariana

NIP. 196612251993031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp822.557.007,00 atau mencapai 119,21% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp690.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp11.739.922.257,00 atau mencapai 99,48% dari alokasi anggaran sebesar Rp11.801.537.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.079.242.652,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp414.768.614,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp31.400.362.896,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp264.111.142,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp37.058.000,00 dan Rp32.042.184.652,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp804.268.839,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.821.455.353,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-7.017.186.514,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-531.795.651,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-7.548.982.165,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp28.378.173.274,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-7.548.982.165,00

kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.304.543,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.211.689.000,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp32.042.184.652,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SUMBAWA BESAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	690.000.000,00	822.557.007,00	119,21	865.494.834,00
Jumlah Pendapatan		690.000.000,00	822.557.007,00	119,21	865.494.834,00
BELANJA					
	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	3.403.885.000,00	3.388.643.007,00	99,55	3.247.616.694,00
Belanja Barang	B.4.	3.584.059.000,00	3.544.375.562,00	98,89	2.679.572.963,00
Belanja Modal	B.5.	4.813.593.000,00	4.806.903.688,00	99,86	2.346.061.000,00
Jumlah Belanja		11.801.537.000,00	11.739.922.257,00	99,48	8.273.250.657,00

II. NERACA

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SUMBAWA BESAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1.	0,00	5.610.500,00
Persediaan	C.1.2.	414.768.614,00	364.838.810,00
Jumlah Aset Lancar		414.768.614,00	370.449.310,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	19.137.590.000,00	18.438.440.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	5.991.843.655,00	5.250.411.655,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	10.592.236.085,00	7.885.274.300,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	360.108.000,00	389.477.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	9.950.000,00	9.950.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-4.691.364.844,00	-3.965.261.871,00
Jumlah Aset Tetap		31.400.362.896,00	28.008.291.084,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	387.536.300,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-123.425.158,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		264.111.142,00	0,00
Jumlah Aset		32.079.242.652,00	28.378.740.394,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	37.058.000,00	567.120,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		37.058.000,00	567.120,00
Jumlah Kewajiban		37.058.000,00	567.120,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	32.042.184.652,00	28.378.173.274,00
Jumlah Ekuitas		32.042.184.652,00	28.378.173.274,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		32.079.242.652,00	28.378.740.394,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SUMBAWA BESAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	804.268.839,00	842.637.930,00
JUMLAH PENDAPATAN		804.268.839,00	842.637.930,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.425.701.007,00	3.247.616.694,00
Beban Persediaan	D.3.	349.400.856,00	351.330.140,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.761.463.546,00	1.369.577.922,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	454.130.732,00	426.074.800,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	956.235.664,00	526.573.861,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	874.523.548,00	760.950.514,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		7.821.455.353,00	6.682.123.931,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-7.017.186.514,00	-5.839.486.001,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0,00	22.856.904,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	536.993.126,00	11.588.376,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	26.479.004,00	12.512.190,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	21.281.529,00	68.174.934,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-531.795.651,00	-44.394.216,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-7.548.982.165,00	-5.883.880.217,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SUMBAWA BESAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	28.378.173.274,00	8.469.707.658,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-7.548.982.165,00	-5.883.880.217,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	1.304.543,00	4.114.623.325,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	0,00	4.211.003.805,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	1.304.543,00	-96.380.480,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	11.211.689.000,00	21.677.722.508,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	32.042.184.652,00	28.378.173.274,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan dan dipercaya di wilayah Nusa Tenggara.

MISI:

1. Menjaga dan mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK di Wilayah Pulau Sumbawa.
2. Melindungi sumber daya alam hayati hewan dan nabati
3. Mendukung keberhasilan program pengembangan Agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan.
4. Memfasilitasi kelancaran perdagangan/pemasaran Produk pertanian.
5. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan perkarantinaan.

MOTTO: " SELALU MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA"

TUGAS & FUNGSI: Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008, SKP Kelas I Sumbawa Besar Mempunyai:

Tugas: Melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan,serta pengawasan keamanan hayati hewani nabati.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	690.000.000,00	690.000.000,00
Jumlah Pendapatan	690.000.000,00	690.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.983.885.000,00	2.928.885.000,00
Belanja Lembur	420.000.000,00	475.000.000,00
Belanja Barang Operasional	1.061.416.000,00	1.133.132.000,00
Belanja Barang Non Operasional	232.229.000,00	288.807.000,00
Belanja Barang Persediaan	427.500.000,00	377.690.000,00
Belanja Jasa	475.900.000,00	362.665.000,00
Belanja Pemeliharaan	415.686.000,00	459.905.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	832.027.000,00	961.860.000,00
Belanja Modal Tanah	700.000.000,00	699.150.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	361.500.000,00	582.835.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.249.468.000,00	3.531.608.000,00
Jumlah Belanja	12.159.611.000,00	11.801.537.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp822.557.007,00 atau mencapai 119,21% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp690.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	717.552,00	0,00

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	690.000.000,00	803.551.287,00	116,46
Pendapatan Lain-lain	0,00	18.288.168,00	0,00
Jumlah	690.000.000,00	822.557.007,00	119,21

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -4,96% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	717.552,00	23.574.456,00	-96,96
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	4.800.000,00	- 100,00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	803.551.287,00	837.120.378,00	-4,01
Pendapatan Lain-lain	18.288.168,00	0,00	0,00
Jumlah	822.557.007,00	865.494.834,00	-4,96

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp11.739.922.257,00 atau 99,48% dari anggaran belanja sebesar Rp11.801.537.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	3.403.885.000,00	3.388.645.685,00	99,55
Belanja Barang	3.584.059.000,00	3.544.375.562,00	98,89
Belanja Modal	4.813.593.000,00	4.806.903.688,00	99,86
Total Belanja Kotor	11.801.537.000,00	11.739.924.935,00	99,48

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Pengembalian Belanja		-2.678,00	0,00
Total Belanja	11.801.537.000,00	11.739.922.257,00	99,48

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 41,90% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Pagu dan Realisasi Belanja Barang
2. Kenaikan Pagu dan Realisasi Belanja Modal
3. Kenaikan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	3.388.643.007,00	3.247.616.694,00	4,34
Belanja Barang	3.544.375.562,00	2.679.572.963,00	32,27
Belanja Modal	4.806.903.688,00	2.346.061.000,00	104,89
Total Belanja	11.739.922.257,00	8.273.250.657,00	41,90

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.388.643.007,00 dan Rp3.247.616.694,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,34% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan Pagu dan Realisasi Belanja Gaji Pokok PNS
2. Kenaikan Pagu dan Realisasi Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
3. Kenaikan Pagu dan Realisasi Belanja Tunjangan Umum PNS
4. Kenaikan Pagu dan Realisasi Belanja Uang Lembur

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.928.384.685,00	2.851.312.412,00	2,70
Belanja Lembur	460.261.000,00	396.306.000,00	16,14
Jumlah Belanja Kotor	3.388.645.685,00	3.247.618.412,00	4,34
Pengembalian Belanja Pegawai	-2.678,00	-1.718,00	55,88
Jumlah Belanja	3.388.643.007,00	3.247.616.694,00	4,34

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.544.375.562,00 dan Rp2.679.572.963,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 32,27% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Keperluan Perkantoran.
2. Kenaikan Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
3. Kenaikan Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
4. Kenaikan Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Bahan
5. Kenaikan Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
6. Kenaikan Pagu dan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas
7. Kenaikan Pagu dan Realisasi Belanja Langganan Listrik
8. Kenaikan Pagu dan Realisasi Belanja Langganan Telepon

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.110.899.976,00	862.969.176,00	28,73
Belanja Barang Non Operasional	287.703.000,00	111.073.000,00	159,02
Belanja Barang Persediaan	377.589.000,00	401.496.500,00	-5,95
Belanja Jasa	357.817.190,00	358.385.626,00	-0,16
Belanja Pemeliharaan	454.130.732,00	419.074.800,00	8,37
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	956.235.664,00	526.573.861,00	81,60
Jumlah Belanja Kotor	3.544.375.562,00	2.679.572.963,00	32,27

Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.544.375.562,00	2.679.572.963,00	32,27

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.806.903.688,00 dan Rp2.346.061.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 104,89% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
2. Kenaikan Pagu dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	699.150.000,00	21.000.000,00	3.229,29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	579.350.000,00	591.694.000,00	-2,09
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.528.403.688,00	1.733.367.000,00	103,56
Jumlah Belanja Kotor	4.806.903.688,00	2.346.061.000,00	104,89
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.806.903.688,00	2.346.061.000,00	104,89

B.5.1. BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp699.150.000,00 dan Rp21.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 3.229,29% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pembelian Tanah dalam rangka rencana pembangunan kantor Wilker Bandara M Kaharudin Sumbawa pada TA. 2019.

Perbandingan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	699.150.000,00	21.000.000,00	3.229,29
Jumlah Belanja Kotor	699.150.000,00	21.000.000,00	3.229,29

Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	699.150.000,00	21.000.000,00	3.229,29

B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp579.350.000,00 dan Rp591.694.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan sebesar -2,09% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Lebih Rendahnya Pagu Anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin pada TA. 2019

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	579.350.000,00	591.694.000,00	-2,09
Jumlah Belanja Kotor	579.350.000,00	591.694.000,00	-2,09
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	579.350.000,00	591.694.000,00	-2,09

B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.528.403.688,00 dan Rp1.733.367.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 103,56% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pada TA 2019 Adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Pembangunan Gedung Kantor UPT

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.528.403.688,00	1.733.367.000,00	103,56
Jumlah Belanja Kotor	3.528.403.688,00	1.733.367.000,00	103,56
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.528.403.688,00	1.733.367.000,00	103,56

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.610.500,00.

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp414.768.614,00 dan Rp364.838.810,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	414.768.614,00	364.838.810,00
Jumlah	414.768.614,00	364.838.810,00

Persediaan per 31 Desember 2018	= 364.838.810
Mutasi Tambah	
Pembelian	= 377.589.000
Transfer Masuk	= 27.323.750
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	= 15.699.439
Mutasi Kurang	
Pemakaian	= 349.400.856
Persediaan rusak/usang	= 13.857.767
Beban Peny Nilai. Persediaan	<u>= 7.423.762</u>
Persediaan per 31 Desember 2019	= 414.768.414

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp19.137.590.000,00 dan Rp18.438.440.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	18.438.440.000,00
Mutasi Tambah	

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	699.150.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	19.137.590.000,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

Saldo Tanah 31 Desember 2019	= 18.438.440.000
Pembelian Tanah	= <u>699.150.000</u>
Saldo per 31 Desember 2019	= 19.137.590.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.991.843.655,00 dan Rp5.250.411.655,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	5.250.411.655,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	579.350.000,00
Transfer Masuk	267.000.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-104.918.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	5.991.843.655,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-4.120.677.861,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1.871.165.794,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Saldo Peralatan dan Mesin 31 Desember 2018	=Rp 5.250.411.655
Mutasi Tambah	
Pembelian 3 unit Mesin Pompa air	= Rp 14.900.000
Pembelian 3 unit genset	= Rp 74.855.000
Pembelian 7 unit AC dan 10 UPS	= Rp 74.574.500
Pembelian 1 unit Refrigerator	= Rp 29.964.000
Pembelian 4 unit Handi Talkie	= Rp 12.000.000
Pembelian 2 unit Kendaraan Bermotor	= Rp 37.320.000
Pembelian 10 Unit Alat Pengolah Data	= Rp 103.039.500
Pembelian Mesin Absensi dan Mesin Potong Rumput	= Rp 22.500.000
Pembelian Meja Kounter	= Rp 137.621.000
Pembelian Gorden	= Rp 36.076.000
Pembelian 8 unit Perangkat Pengolah Data	= Rp 36.500.00
Transfer Masuk 1 unit mobil dri BBKP Surabaya	= Rp 267.000.000
Mutasi Kurang (Penghentian aset dari penggunaan):	
1 unit station wagon (mobil)	= Rp 92.064.000
3 unit sepeda motor	= Rp 12.854.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.592.236.085,00 dan Rp7.885.274.300,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	7.885.274.300,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3.008.087.688,00
Pengembangan Melalui KDP	520.316.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-813.933.300,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-7.508.603,00
Saldo per 31 Desember 2019	10.592.236.085,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-436.799.908,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	10.155.436.177,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

Saldo awal Gedung & Bangunan 31 Desember 2018	= Rp 7.885.274.300
Mutasi Tambah	
Pembangunan Gedung Kantor UPT	= Rp 2.513.987.688
Renovasi Gedung Kantor Pelayanan Wilker Sape	= Rp 220.630.000
Renovasi Gedung Kantor Pelayanan Wilker Pelabuhan Laut Bima 1 (satu) Paket	= Rp 232.786.000
Pembangunan Taman Kantor UPT	= Rp 109.500.000
Pembangunan Pagar IKH Wilker Badas	= Rp 193.050.000
Penataan Gedung Laboratorium SKP	= Rp 66.900.000
Pembangunan Talud IKH Wilker Badas	= Rp 191.550.000
Mutasi Kurang	
a. Pengembalian Belanja Modal TAYL atas TGR karena kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Nodstal Wilker Badas oleh CV. Primadana General Contractor & Supplier senilai Rp2.779.920.	
b. Pengembalian Belanja Modal TAYL atas TGR karena kekurangan Volume Pada Pekerjaan Renovasi Gedung Laboratorium Wilker Pelabuhan Sape oleh CV. Primadana senilai Rp4.728.683.	
c. Penghapusan berupa:	
1 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen	= Rp 560.684.000
1 unit Bangunan untuk kandang	= Rp 34.708.300
1 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen	= Rp 182.328.000
1 Unit Gedung Pos Jaga Permanen	= Rp 36.213.000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp360.108.000,00 dan Rp389.477.000,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	389.477.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-29.369.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	360.108.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-63.792.160,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	296.315.840,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

Saldo awal Irigasi 31 Desember 2018 = Rp 114.337.000

Mutasi kurang:

- a. Penghapusan Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan senilai Rp12.730.000
- b. Saluran Pembuang senilai Rp16.639.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.950.000,00 dan Rp9.950.000,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-4.691.364.844,00 dan Rp-3.965.261.871,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	5.991.843.655,00	-4.120.677.861,00	1.871.165.794,00

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
2.	Gedung dan Bangunan	10.592.236.085,00	-436.799.908,00	10.155.436.177,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	360.108.000,00	-63.792.160,00	296.315.840,00
4.	Aset Tetap Lainnya	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00
Akumulasi Penyusutan		16.954.137.740,00	-4.691.364.844,00	12.262.772.896,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp387.536.300,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	948.220.300,00
Mutasi Kurang	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-560.684.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	387.536.300,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-123.425.158,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	264.111.142,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Mutasi Tambah:

1 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen	= Rp 560.684.000
1 Unit Station Wagon/mobil	= Rp 92.064.000
3 Unit Sepeda Motor	= Rp 12.854.000
1 Unit Bangunan untuk kandang	= Rp 31.553.000
1 Unit Bangunan untuk kandang	= Rp 3.155.300
1 Unit Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan	= Rp 12.730.000

1 Unit Saluran Pembuang	= Rp 16.639.000
1 Unit Banguna Gedung Kantor Permanen	= Rp 182.328.000
1 Unit Gedung Pos Jaga Permanen	= Rp 36.213.000
2. Mutasi pengurangan berupa Penghapusan BMN:	
1 Unit Bangunan Gedung Kantor Permanen	= Rp 560.684.000

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-123.425.158,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	387.536.300,00	-123.425.158,00	264.111.142,00
Akumulasi Penyusutan		387.536.300,00	-123.425.158,00	264.111.142,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp37.058.000,00 dan Rp567.120,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	37.058.000,00	0,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0,00	567.120,00
Jumlah	37.058.000,00	567.120,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp32.042.184.652,00 dan Rp28.378.173.274,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp804.268.839,00 dan Rp842.637.930,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	803.551.287,00	837.120.378,00	-4,01
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	4.800.000,00	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	717.552,00	717.552,00	0,00
Jumlah	804.268.839,00	842.637.930,00	-4,55

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.425.701.007,00 dan Rp3.247.616.694,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.983.592.900,00	1.875.557.780,00	5,76
Beban Pembulatan Gaji PNS	35.901,00	33.990,00	5,62
Beban Tunj. Anak PNS	45.649.508,00	44.711.896,00	2,10
Beban Tunj. Beras PNS	122.462.220,00	123.838.200,00	-1,11
Beban Tunj. Fungsional PNS	228.870.000,00	235.860.000,00	-2,96

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Tunj. PPh PNS	1.350.624,00	1.661.130,00	-18,69
Beban Tunj. Struktural PNS	17.640.000,00	17.180.000,00	2,68
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	161.210.854,00	157.736.698,00	2,20
Beban Tunjangan Umum PNS	33.275.000,00	26.190.000,00	27,05
Beban Uang Lembur	460.261.000,00	396.306.000,00	16,14
Beban Uang Makan PNS	371.353.000,00	368.541.000,00	0,76
Jumlah	3.425.701.007,00	3.247.616.694,00	5,48

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp349.400.856,00 dan Rp351.330.140,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	349.400.856,00	351.330.140,00	-0,55
Jumlah	349.400.856,00	351.330.140,00	-0,55

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.761.463.546,00 dan Rp1.369.577.922,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	42.790.000,00	-100,00
Beban Bahan	287.703.000,00	103.873.000,00	176,98
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	220.080.000,00	147.192.000,00	49,52
Beban Honor Output Kegiatan	0,00	7.200.000,00	-100,00
Beban Jasa Lainnya	77.645.000,00	80.140.000,00	-3,11
Beban Jasa Profesi	13.300.000,00	0,00	0,00
Beban Keperluan Perkantoran	651.496.770,00	535.581.955,00	21,64
Beban Langganan Air	13.210.598,00	19.498.700,00	-32,25
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.781.000,00	0,00	0,00
Beban Langganan Listrik	178.877.203,00	145.373.845,00	23,05
Beban Langganan Telepon	31.265.856,00	24.425.651,00	28,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	231.274.000,00	165.984.000,00	39,34
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.601.206,00	14.080.221,00	-46,02
Beban Sewa	47.228.913,00	83.438.550,00	-43,40
Jumlah	1.761.463.546,00	1.369.577.922,00	28,61

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp454.130.732,00 dan Rp426.074.800,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	183.315.000,00	166.600.000,00	10,03
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	270.815.732,00	259.474.800,00	4,37

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Jumlah	454.130.732,00	426.074.800,00	6,58

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp956.235.664,00 dan Rp526.573.861,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	427.021.260,00	210.668.429,00	102,70
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.170.000,00	9.000.000,00	135,22
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	406.247.754,00	279.827.146,00	45,18
Beban Perjalanan Tetap	101.796.650,00	27.078.286,00	275,93
Jumlah	956.235.664,00	526.573.861,00	81,60

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp874.523.548,00 dan Rp760.950.514,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	255.235.725,00	208.344.288,00	22,51
Beban Penyusutan Irigasi	12.110.372,00	13.166.267,00	-8,02
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	21.981.728,00	21.981.728,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	5.749.301,00	5.749.301,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.626.790,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	574.819.632,00	511.708.930,00	12,33
Jumlah	874.523.548,00	760.950.514,00	14,93

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-536.993.126,00	-11.588.376,00	4.533,89
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-7.423.762,00	-68.174.934,00	-89,11
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-13.857.767,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	15.699.439,00	12.512.190,00	25,47
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	22.856.904,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	10.779.565,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	-531.795.651,00	-44.394.216,00	1.097,89

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp28.378.173.274,00 dan Rp8.469.707.658,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-7.548.982.165,00 dan Rp-5.883.880.217,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.304.543,00 dan Rp4.114.623.325,00. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dikarenakan pengurangan nilai aset akibat pengembalian belanja modal.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.211.003.805,00.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.304.543,00 dan Rp-96.380.480,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.304.543,00
Gedung dan Bangunan	-7.508.603,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	7.508.603,00

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	7.508.603,00
Jumlah	1.304.543,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.211.689.000,00 dan Rp21.677.722.508,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	11.739.922.257,00
Diterima dari Entitas Lain	-822.557.007,00
Transfer Masuk	294.323.750,00
Jumlah	11.211.689.000,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-822.557.007,00 sedangkan DKEL sebesar Rp11.739.922.257,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp294.323.750,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	27.323.750,00
2.	Peralatan dan Mesin	018120500237483000KD	267.000.000,00

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
Jumlah			294.323.750,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp32.042.184.652,00 dan Rp28.378.173.274,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

-

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pernaian Kelas I Sumbawa Besar adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: drh. Ida Bagus Putu Raka Ariana
Ka Sub Seksi Pelayanan Opesional	: Abdul Salam, SP
Ka Urusan Tata Usaha	: Andik Akrimil Fata, SP
Pejabat Pembuat Komitmen	: drh. Ida Bagus Putu Raka Ariana
Pejabat Penandatanganan SPM	: Andik Akrimil Fata, SP

Sampai dengan 31 Desember 2019 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA Revisi 1 Tanggal 29 Maret 2019
2. DIPA Revisi 2 Tanggal 27 Juni 2019
3. DIPA Revisi 3 Tanggal 14 Agustus 2019
4. DIPA Revisi 4 Tanggal 30 September 2019
5. DIPA Revisi 5 Tanggal 21 Oktober 2019
6. DIPA Revisi 6 Tanggal 10 Desember 2019

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN TA. 2019



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-180240/WPB.21/KP.101/2019

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SUMBAWA BESAR (567741) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SUMBAWA BESAR, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2019.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	11,801,537,000	11,801,537,000	0
2	Belanja	11,739,924,935	11,739,924,935	0
3	Pengembalian Belanja	-2,678	-2,678	0
4	Estimasi Pendapatan	690,000,000	690,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	822,557,007	822,557,007	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

I Gede Suarnaya
NIP.197411181995111001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

drh. Ida Bagus Putu Raka Ariana
NIP.196612251993031001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SUMBAWA BESAR (567741)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 11,801,537,000

SAI/SA-BUN : 11,801,537,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 690,000,000

SAI/SA-BUN : 690,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 11,739,924,935

SAI/SA-BUN : 11,739,924,935

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -2,678

SAI/SA-BUN : -2,678

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 822,557,007

SAI/SA-BUN : 822,557,007

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

I Gede Suarnaya
NIP.197411181995111001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

drh. Ida Bagus Putu Raka Ariana
NIP.196612251993031001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah